

Aksi Damai Diam di depan Istana Presiden – Kamis ke-81  
**JSKK** Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan  
Jl. Bonang IA, Menteng, Jakarta Pusat 12870 Telp. 021-31931181 Fax. 021-3913473

---

Nomor : 53/Surat Terbuka\_JSJK/VII/2008

Jakarta, 11 September 2008

Hal : 24 Tahun Tragedi Tanjung Priok -  
Negara Masih Mengabaikan Hak Korban

Kepada Yth.  
Presiden Republik Indonesia  
**Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jakarta

Bapak Presiden terhormat, dua puluh empat tahun sudah tragedi Tanjung Priok berlalu. Negara seolah lupa sejarah kelam yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Tragedi ini terjadi akibat pemaksaan tafsir tunggal atas Pancasila yang diberlakukan dalam setiap kegiatan politik. Puncaknya pada malam 12 September, terjadi penembakan terhadap jamaah tabligh akbar yang sebelumnya telah menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditangkap di Komando Distrik Militer (Kodim), di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Saat itu para jamaah tengah berjalan menuju Kodim dan mendapat penghadangan dari pasukan bersenjata lengkap. Peristiwa ini mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa dan luka. Proses penangkapan atas orang-orang yang terlibat berlanjut hingga ke daerah-daerah. Mereka, para korban tidak hanya ditangkap dan ditahan, namun diperlakukan sewenang-wenang, serta pengadilan yang digelar rupanya hanya sandiwara penguasa. Akibat langsung yang dirasakan oleh korban adalah kondisi traumatis yang belum bisa disembuhkan dengan serta merta, terampasnya hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia, beratnya beban ekonomi yang harus ditanggung, anak-anak korban tidak bisa bersekolah, korban tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, serta diasingkan di masyarakat sekitar akibat citra stigma negatif yang dilekatkan kepada mereka.

Tumbangnya Orde Baru, kembali memompa semangat juang para korban untuk menuntut pertanggungjawaban negara menghukum para pelaku, mulai pelaku di level pemangku kebijakan tertinggi sampai pelaku lapangan. Usaha ini membuahkan hasil. Komnas HAM membuat sebuah badan penyelidikan yakni, Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T), diikuti pada tahun 2003 dengan digelarnya Pengadilan HAM *Adhoc* untuk kasus ini. Namun pengadilan itu tidak mendapatkan hasil optimal. Tidak ada satu pun pelaku yang dihukum. Mahkamah Agung (MA) pun akhirnya membebaskan seluruh pelaku. Praktik impunitas kembali eksis bagi para pelaku di negara ini. Sementara korban tetaplah menjadi korban tanpa adanya pemulihan efektif (reparasi korban) oleh negara.

Bapak Presiden yang kami hormati, jika kita memiliki kesadaran sebagai bangsa yang menjunjung tinggi penegakan HAM, maka sudah seharusnya negara menghukum para pelaku seberat-beratnya. Hanya dengan penghukuman, mampu membuat pelaku jera dan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini agar tidak terjadi lagi di masa depan. Negara juga dituntut untuk memulihkan segera hak-hak dasar terhadap para korban dan keluarganya. Kami para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu akan terus berjuang demi tegaknya keadilan di negara ini sampai kapan pun. Perjuangan yang kami lakukan tak akan surut. Perjuangan ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kemajuan bangsa dan demi membangun sebuah peradaban yang berperikemanusiaan dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian surat tuntutan ini kami sampaikan. Api harapan selalu memenuhi hati dan pikiran kami. Atas perhatian dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kami ucapkan terima kasih.

**JSKK,**

**Sumarsih**

**Suciwati**

**Bejo Untung**

Tembusan kepada :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM